

DARI SUMPAAH PEMUDA (1928) SAMPAI KONGRES BAHASA INDONESIA I (1938): KAJIAN LINGUISTIK HISTORIS SEKITAR MASA-MASA PRAKEMERDEKAAN

Sudaryanto

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
FKIP Universitas Ahmad Dahlan
Jalan Pramuka 42, Sidikan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY 55161
sudaryanto82@yahoo.com

Abstract

The Indonesian language was voiced by the youth of Indonesia through the text of the Youth Pledge (Sumpah Pemuda) on October 28, 1928. The Youth Pledge event became the basis for the implementation of the Indonesian Congress I in Solo. The purpose of this study is to study the events of the Youth Pledge and the Indonesian Congress I in historical linguistic studies. Data collection techniques in this study using the researcher as the main instrument of research. The data collected are the events of the Youth Pledge and the Indonesian Congress I along with the short and long term changes in the Indonesian sound system, grammar, and vocabulary. The data analysis technique used in this research is the content study technique objectively and systematically. As for the results of this research is (1) the application of van Ophuijsen's spelling in writing the Youth Pledge text and the Indonesian Congress I decision, (2) the adoption of Sanskrit vocabulary in the text of the Youth Pledge, and (3) the national language politics and Indonesian Congress I decision.

Keywords: Youth Pledge, Indonesian Congresses I, historical linguistics

Abstrak

Bahasa Indonesia diikrarkan oleh para pemuda Indonesia melalui teks Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Peristiwa Sumpah Pemuda itu menjadi dasar atas penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji peristiwa Sumpah Pemuda dan Kongres Bahasa Indonesia I dalam kajian linguistik historis (historical linguistics). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan peneliti sebagai instrumen utama penelitian. Data yang dikumpulkan adalah peristiwa Sumpah Pemuda dan Kongres Bahasa Indonesia I beserta perubahan-perubahan jangka pendek dan jangka panjang dalam sistem bunyi, gramatika, dan kosakata bahasa Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kajian isi (content analysis) secara objektif dan sistematis. Adapun hasil penelitian ini adalah (1) penerapan Ejaan van Ophuijsen dalam penulisan teks Sumpah Pemuda dan putusan Kongres Bahasa Indonesia I, (2) penyerapan kosakata Sanskerta dalam teks Sumpah Pemuda, dan (3) politik bahasa nasional dari teks Sumpah Pemuda dan putusan Kongres Bahasa Indonesia I.

Kata kunci: Sumpah Pemuda, Kongres Bahasa Indonesia I, linguistik historis

*Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe
bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia*

*Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe
berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia*

*Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng
bahasa persatoean, bahasa Indonesia*

1. Pendahuluan

Ikrar Sumpah Pemuda, sebagaimana dinukilkan di atas, merupakan ikrar yang terberkati. Berkat ikrar itu, lahirlah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa resmi negara Indonesia, berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkat ikrar itu pula, bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah, berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dengan demikian, di usianya yang hampir 90 tahun (28 Oktober 1928—28 Oktober 2018) ini, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa yang terberkati bagi bangsa dan negara Indonesia.

Sebelum ikrar Sumpah Pemuda dibacakan, para pemuda Indonesia dari berbagai daerah terlebih dahulu melakukan Kongres Pemuda ke-II di Jakarta, pada tanggal 27—28 Oktober 1928. Para pemuda itu, antara lain, berasal dari Jong Java, Jong Soematra (Pemoeda Soematra), Pemoeda Indonesia, Sekar Roekoen, Jong Islamieten, Jong Batakbond, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem Betawi, dan Perhimpoean Peladjar Indonesia. Para pemuda itu secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia (Sugono, 2011, p. 138). Dengan kata lain, para pemuda yang mengikrarkan Sumpah Pemuda itu, telah bergeser dari “pola pikir kedaerahan” (bahasa daerah) menuju ke “pola pikir nasional” (bahasa Indonesia) (Sudaryanto, 2017a, p. 1-7).

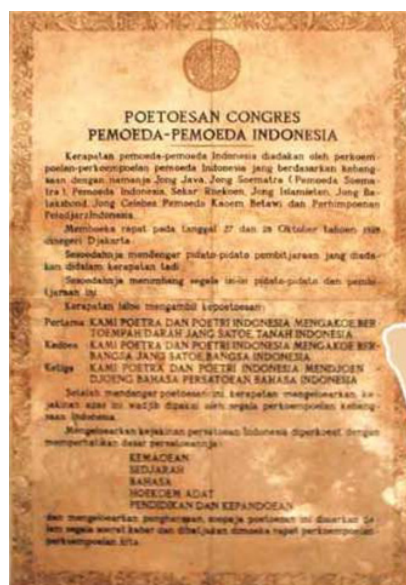


Gambar 1. Peserta Kongres Pemuda ke-II di Jakarta,
27-28 Oktober 1928

Peristiwa Sumpah Pemuda itu menjadi dasar atas penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, tepatnya pada tanggal 25-27 Juni 1938. Melalui kongres tersebut, sejumlah cendekiawan Indonesia, seperti Mr. Amir Sjarifoeddin, St. Takdir Alisjhabana, Mr.

Muh. Yamin, K. St. Pamoentjak, Ki Hadjar Dewantara, Adi Negoro, Soekardjo Wirjopranoto, R.M. Ng. dr. Poerbotjaroko, dan Sanoesi Pane menyampaikan gagasan-gagasan yang brilian tentang bahasa Indonesia. Salah satunya ialah gagasan supaya diangkat suatu komisi untuk memeriksa persoalan mendirikan Institut Bahasa Indonesia. Di kemudian hari, nama institut tersebut berganti nama hingga akhirnya menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, sejak tahun 2010-sekarang.

Namun demikian, sejumlah buku teks mata kuliah umum (MKU) Bahasa Indonesia yang penulis jumpai, seperti Ismawati (2012, p. 3-8), Rohmadi dkk (2014, p. 1-3), Mulyati (2014, p. 8-9), dan Juanda dkk (2017, p. 1) belum mengurai secara lengkap perihal peristiwa Sumpah Pemuda (1928) dan Kongres Bahasa Indonesia I (1938). Padahal, kedua peristiwa bersejarah itu sangat penting untuk ditulis dan diketahui oleh generasi muda, khususnya yang mengikuti mata kuliah bersangkutan. Sementara itu, Paauw (2009, p. 1-16) hanya membahas peristiwa Sumpah Pemuda (1928) yang dilihatnya dari perspektif kebijakan bahasa nasional. Atas dasar itu, penting kiranya diwujudkan kajian mengenai Sumpah Pemuda (1928) dan Kongres Bahasa Indonesia I (1938) dari kajian linguistik historis. Selain melengkapi referensi yang terkait, kajian ini juga menjadi langkah awal untuk lebih mencermati peristiwa-peristiwa bersejarah prakemerdekaan RI yang berkaitan erat dengan bahasa Indonesia.



Gambar 2. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia yang memuat tiga buah ikrar Sumpah Pemuda

Menurut Kridalaksana (2011, p. 144) dan Sudaryanto (2017b, p. 66), linguistik historis merupakan cabang linguistik yang menyelidiki perubahan jangka pendek dan jangka panjang dalam sistem bunyi, gramatika, dan kosakata satu bahasa atau lebih. Dalam kajian ini, peneliti memfokuskan pada linguistik historis sekitar masa-masa prakemerdekaan, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda (1928) dan Kongres Bahasa Indonesia I (1938). Menurut peneliti, kedua peristiwa bersejarah itu memiliki perubahan jangka pendek dan jangka panjang dalam sistem bunyi, gramatika, dan kosakata bahasa Indonesia. Pada masa-masa prakemerdekaan itu, ejaan yang berlaku di Indonesia adalah ejaan van Ophuijsen, sebuah ejaan Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia yang dimuat dalam *Kitab Logat Melajoe* tahun 1901 oleh Charles Adriaan van Ophuijsen, yang merupakan ejaan Latin resmi pertama di Indonesia (Sudaryanto, 2017b, p. 33).



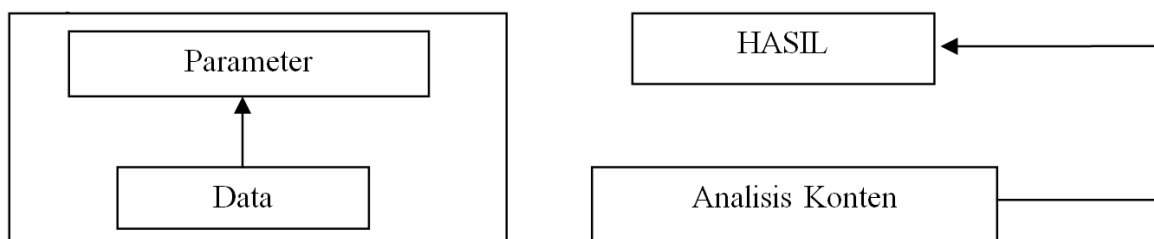
Gambar 3. Charles Adriaan van Ophujsen

Menurut Kridalaksana (2011, p. 167), Charles Adriaan van Ophujsen (1856—1917) adalah seorang sarjana bahasa Melayu bangsa Belanda; juga pernah menulis mengenai bahasa Batak dan Minangkabau. Pada tahun 1896 ia diberi tugas Pemerintah Belanda menstandarisasi aksara Latin untuk bahasa Melayu (dibantu oleh Engku Nawawi gl. St. Makmur dan M. Taib St. Ibrahim). Hasilnya adalah *Kitab Logat Melajoe* (1901). Karyanya yang berpengaruh adalah *Maleische Spraakkunst* (1910).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode analisis konten (Krippendorff, 1980, p. 21). Penelitian tentang peristiwa Sumpah Pemuda (1928) dan Kongres Bahasa Indonesia I (1938) merupakan analisis isi pesan yang tercermin dari kedua peristiwa bersejarah tersebut. Oleh karena itu, kajian ini bersifat deskriptif yang memerikan tentang kedua peristiwa bersejarah terkait dengan bahasa Indonesia. Masalah peristiwa Sumpah Pemuda (1928) dan Kongres Bahasa Indonesia (1938) itu akan dianalisis dari perspektif linguistik historis yang memadukan faktor sistem bunyi, gramatika, dan kosakata bahasa Indonesia.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini merupakan estimasi terhadap gejala yang terdapat pada data. Pola linguistik historis terhadap Sumpah Pemuda (1928) dan Kongres Bahasa Indonesia I (1938), yang akan dideskripsikan menyangkut beberapa gejala, maka parameter yang digunakan juga meliputi beberapa parameter sesuai gejala yang dideskripsikan. Jika diskemakan dapat digambarkan berikut.



Pengumpulan data dilakukan dengan teknik membaca dan mencatat secara cermat yang dijadikan sebagai contoh melalui kartu data. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda (1928) dan Kongres Bahasa Indonesia I (1938) dicatat dari sejumlah referensi pendukung. Kartu

data ini dibagi dua kelompok, yaitu (1) kelompok yang mendeskripsikan tentang peristiwa Sumpah Pemuda (1928) dan (2) kelompok yang mendeskripsikan tentang Kongres Bahasa Indonesia I (1938).

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas semantik, jika data yang muncul perihal peristiwa Sumpah Pemuda (1928) dan Kongres Bahasa Indonesia I (1938) beserta perubahan-perubahan jangka pendek dan jangka panjang dalam sistem bunyi, gramatika, dan kosakata bahasa Indonesia. Reliabilitas yang digunakan adalah reliabilitas interrater, yaitu mengonsensuskan hasil penelitian dengan pakar linguistik bahasa Indonesia dan/atau pengajar mata kuliah Sejarah dan Politik Bahasa Nasional di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan.

Data dianalisis dengan teknik analisis konten melalui prosedur (a) pencatatan, (b) reduksi data, (c) pengkategorian, dan (d) inferensi. Pencatatan dilakukan dengan kartu data. Unit data diambil dari unit kata atau kosakata yang mencerminkan peristiwa Sumpah Pemuda (1928) dan Kongres Bahasa Indonesia I (1938). Proses analisisnya dilakukan dengan alur: (1) pemahaman peristiwa Sumpah Pemuda (1928) dan Kongres Bahasa Indonesia I (1938); (2) identifikasi peristiwa Sumpah Pemuda (1928) dan Kongres Bahasa Indonesia I (1938) berdasarkan sistem bunyi, gramatika, dan kosakata bahasa Indonesia; dan (3) klasifikasi peristiwa sejarah Sumpah Pemuda (1928) dan Kongres Bahasa Indonesia I (1938). Setelah klasifikasi data yang belum terstruktur, kemudian ditata dan disaring dengan membuang data-data yang kurang relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap inferensi, yaitu menginterpretasikan peristiwa Sumpah Pemuda (1928) dan Kongres Bahasa Indonesia I (1938) dari sudut pandang linguistik historis.

3. Hasil dan Pembahasan

Di bagian ini dipaparkan hasil-hasil temuan tentang Sumpah Pemuda (1928) dan Kongres Bahasa Indonesia I (1938) dilihat dari kajian linguistik historis. Secara berturut-turut akan dibahas di bawah ini peristiwa Sumpah Pemuda (1928) dan Kongres Bahasa Indonesia I (1938) beserta perubahan-perubahan jangka pendek dan jangka panjang dalam sistem bunyi, gramatika, dan kosakata bahasa Indonesia. Hasil penelitian mencakup tiga hal, yaitu (1) penerapan Ejaan van Ophuijsen dalam teks Sumpah Pemuda (1928) dan putusan Kongres Bahasa Indonesia I (1938), (2) penyerapan kosakata Sanskerta dalam teks Sumpah Pemuda (1928), dan (3) politik bahasa nasional dari teks Sumpah Pemuda (1928) dan putusan Kongres Bahasa Indonesia I (1938).

3.1 Penerapan Ejaan van Ophuijsen dalam Teks Sumpah Pemuda (1928) dan Putusan Kongres Bahasa Indonesia I (1938)

Ejaan Charles Adriaan van Ophuijsen atau lebih dikenal Ejaan van Ophuijsen itu pernah diterapkan di Indonesia, khususnya pada rentang tahun 1901 sampai dengan tahun 1947, saat diterapkan Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik, berdasarkan surat keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Nomor 264/Bhg.A, tanggal 19 Maret 1947. Ejaan van Ophuijsen itu digunakan dalam menulis teks Sumpah Pemuda (1928) dan putusan Kongres Bahasa Indonesia I (1938). Berikut ini pembahasan tentang penerapan Ejaan van Ophuijsen dalam teks Sumpah Pemuda (1928) dan putusan Kongres Bahasa Indonesia I (1938).

Teks Sumpah Pemuda (1928) terdiri atas tiga buah kalimat, sebagaimana yang sudah tertulis di awal tulisan ini.

*Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe
bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia*

*Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe
berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia*

*Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng
bahasa persatoean, bahasa Indonesia*

Ada tiga ciri penanda lingual dalam Ejaan van Ophuijsen, yaitu (1) penggunaan huruf *j* yang dibaca *y /y/*, (2) penggunaan huruf *oe* yang dibaca *u /u/*, dan (3) penggunaan tanda diakritik mencakup koma, ain, dan tanda trema. Jika mengacu ciri-ciri tadi, maka bisa dikatakan bahwa teks Sumpah Pemuda (1928) menggunakan Ejaan van Ophuijsen secara konsisten. Misalnya, kata *poetra* menggunakan huruf *oe* sebagai *u*, kata *jang* menggunakan huruf *j* sebagai *y*, dan kata *mendjoendjoeng* menggunakan huruf *dj* sebagai *j*. Di bawah ini teks Sumpah Pemuda yang ditulis ulang dengan menggunakan ejaan bahasa Indonesia terkini (baca: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUEBI).

*Kami putra dan putri Indonesia mengaku
bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia*

*Kami putra dan putri Indonesia mengaku
berbangsa yang satu, bangsa Indonesia*

*Kami putra dan putri Indonesia menjunjung
bahasa persatuan, bahasa Indonesia*

Sementara itu, putusan Kongres Bahasa Indonesia I (1938) terdiri atas sembilan butir yang ditulis dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan format Ejaan van Ophuijsen. Di bawah ini teks putusan Kongres Bahasa Indonesia I yang dimulai dari judul, tempat, titimangsa, dan butir-butirnya.

**POETOESAN
KONGGERES BAHASA INDONESIA I
Solo, 25—27 Djuni 1938**

- I. Sesoedah mendengarkan dan memperkatakan praeadvies toean Mr. Amir Sjarifoeddin tentang “Menjesoeaikan kata dan faham asing ke dalam bahasa Indonesia”, maka Konggres ternjata pada oemoemnja setoedjoe mengambil kata-kata asing oentoek ilmoe pengetahoean. Oentoek ilmoe pengetahoean jang sekarang, Konggres setoedjoe kalaoe kata-kata itoe diambil dari perbendaharaan oemoem. Pekerdjaan itoe hendaklah didjalankan dengan hati-hati, karena itoe perkara itoe patoetlah diserahkan kepada satoe badan.
- II. Sesoedah mendengarkan dan bertoekar pikiran tentang praeadvies toean St. Takdir Alisjahbana hal “Pembaharoean bahasa dan oesaha mengatoernja”, maka sepanjang pendapat Konggres, soedah ada pembaharoean bahasa jang timboel karena ada tjara berpikir jang baroe, sebab itoe merasa perloe mengatoer pembaharoean itu.

- III. Sesoadah mendengarkan praeadvies toean-toean St. Takdir Alisjahbana dalil ke-IV dan Mr. Muh. Yamin, maka Konggres berpendapatan bahwa gramatika jang sekarang tidak memoeaskan lagi dan tidak menoentoet woedjoed bahasa Indonesia, karena itoe perloe menjoesoen gramatika baroe, jang menoeroet woedjoed bahasa Indonesia.
- IV. Orang dari berbagai-bagai golongan, dari berbagai-bagai daerah, berkonggres di Solo pada tanggal 25—27 Djuni 1938, setelah mendengarkan praeadvies toean K. St. Pamoentjak tentang “Hal edjaan bahasa Indonesia”, dan setelah bertoeakar pikiran tentang hal itoe, maka jang hadir berpendapat: bahwa edjaan baroe tidak perloe diadakan, sampai Konggres mengadakan edjaan sendiri, bahwa edjaan jang soedah berlakoe, jaitoe edjaan van Ophuijsen sementara boleh diterima, tetapi karena mengingat kehematan dan kesederhanaan, perloe dipikirkan peroebahan seperti jang diseboetkan oleh praeadviseur, karena itoe berpengharapan:
1. soepaja orang Indonesia selaloe memakai edjaan jang terseboet;
 2. soepaja fractie Nasional di Volksraad mendesak Pemerintah oentoek memakai edjaan seperti jang dimaksoedkan oleh Konggres;
 3. soepaja perhimpoean kaoem goeroe soeka membantoe poetoesan Konggres.
- V. Setelah mendengar praeadvies toean Adi Negoro, tentang “Bahasa Indonesia di dalam persoeratkabaran”, maka sependjang pendapatan Konggres, soedah waktoenja kaoem wartawan berdaja oepaja mentjari djalan-djalan oentoek memperbaiki bahasa di dalam persoeratkabaran, karena itoe berharap soepaja Perdi bermoeepakat tentang hal itoe dengan anggota-anggotanja dan komisi jang akan dibentoeak oleh Konggres jang baroe bersama-sama dengan Hoofdbestuur Perdi.
- VI. Sesoadah mendengarkan praeadvies Ki Hadjar Dewantara dalil jang ke-X jang disokong oleh toean R.M. Ng. dr. Poerbotjaroko, maka Konggres Bahasa Indonesia memoetoeskan, bahwa Konggres berpendapatan dan mengandjoerkan, soepaja didalam pergoeroean menengah diajarkan djoega edjaan internasional.
- VII. Sesoadah mendengarkan praeadvies toean Soekardjo Wirjopranoto tentang “Bahasa Indonesia dalam Badan Perwakilan”, jang dioetjapkan dan dipertahankan oleh toean R.P. Soeroso, maka Konggres berpendapatan dan mengeloearkan pengharapan: Pertama: mengeloearkan penghargaan soepaja menoendjang oesaha oentoek mendjadikan bahasa Indonesia jang sjah dan bahasa oentoek oendang-oendang negeri.
- VIII. Sesoadah mendengar praeadvies toean Sanoesi Pane tentang “Instituut Bahasa Indonesia” dan mendengar pendirian Komite tentang hal itoe, maka Konggres Bahasa Indonesia memoetoeskan: soepaja diangkat soeatoe komisi oentoek memeriksa persoalan mendirikan Instituut Bahasa Indonesia dan Konggres mengharap soepaja mengoemoemkan pendapatan komisi tentang soal yang terseboet.
- IX. Sesoadah mendengar praeadvies toean-toean St. Takdir Alisjahbana, Mr. Muh. Yamin, dan Sanoesi Pane, maka Konggres berpendapatan, bahwa oentoek kemadjoean masjarakat Indonesia, penjelidikan bahasa dan kesoesasteraan dan kemadjoean keboedajaan bangsa Indonesi, perloe didirikan Pergoeroean Tinggi Kesoesasteraan dengan selekas-lekasnja.

Teks Putusan Kongres Bahasa Indonesia I (1938), sebagaimana tertulis di atas, memuat tiga ciri penanda lingual dalam Ejaan van Ophuijsen, yaitu (1) penggunaan huruf *j* untuk huruf *y*, (2) penggunaan huruf *oe* untuk huruf *u*, dan (3) penggunaan tanda diakritik mencakup koma, ain, dan tanda trema. Jika mengacu ciri-ciri tadi, maka bisa dikatakan teks Putusan Kongres Bahasa Indonesia I (1938) menggunakan Ejaan van Ophuijsen secara konsisten. Misalnya, butir I ada kata *sesoadah* menggunakan huruf *oe* untuk *u*, butir IX ada

selekas-lekasnja menggunakan huruf *j* untuk *y*.

3.2 Penyerapan Kosakata Sanskerta dalam Teks Sumpah Pemuda (1928)

Dalam teks Sumpah Pemuda (1928) tercatat dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *bangsa* dan *bahasa*. Kata *bangsa* berasal dari kata *vaṃśa* (Jones, 2007, p 33). Kata *bahasa* berasal dari kata *bhāṣā* (var. *basa*) (Jones, 2007, p. 30). Adanya kata *bangsa* dan *bahasa* yang berasal dari bahasa Sanskerta itu, menunjukkan betapa bahasa Indonesia diperkaya oleh bahasa-bahasa asing, salah satunya adalah bahasa Sanskerta.

3.3 Politik Bahasa Nasional dari Teks Sumpah Pemuda (1928) dan Putusan Kongres Bahasa Indonesia I (1938)

Teks Sumpah Pemuda (1928) dan Putusan Kongres Bahasa Indonesia I (1938) melahirkan adanya semacam “politik bahasa nasional” (*the national language politics*). Di kemudian hari, atau tepatnya pada tanggal 29—31 Oktober 1974 diadakan Praseminar Politik Bahasa Nasional di Jakarta, kemudian setahun berikutnya, tanggal 25—28 Februari 1975 diadakan Seminar Politik Bahasa Nasional. Bisa dikatakan bahwa teks Sumpah Pemuda (1928) dan Putusan Kongres Bahasa Indonesia I (1938) menjadi embrio bagi kerangka politik bahasa nasional di masa-masa mendatang.

Melalui teks Sumpah Pemuda (1928), khususnya butir ketiga yang berbunyi: “*Kami putra dan putri menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia*”, bahasa Indonesia mengalami kelahiran secara politis dan dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kemudian, hal itu diikuti dengan kelahiran bahasa Indonesia secara yuridis, yaitu bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36).

Sementara itu, melalui Putusan Kongres Bahasa Indonesia I (1938), disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu, seperti Mr. Amir Sjarifoeddin, St. Takdir Alisjahbana, Sanoesi Pane, Mr. Muh. Yamin, K. St. Pamoentjak, Adi Negoro, Ki Hadjar Dewantara, dan Soekardjo Wirjopranoto. Ada dua usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia berdasarkan Putusan Kongres Bahasa Indonesia I (1938) yang terbilang penting, yaitu ejaan bahasa Indonesia dan pendirian institusi bahasa Indonesia (lihat butir IV dan VIII).

Pertama, soal ejaan bahasa Indonesia. Saat ikrar Sumpah Pemuda (1928) dan Putusan Kongres Bahasa Indonesia I (1938) dibacakan, ejaan yang berlaku saat itu adalah Ejaan van Ophuijsen. Bagi sebagian cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu, Ejaan van Ophuijsen dianggap sebagai produk kebahasaan kolonial penjajah Belanda (van Ophuijsen merupakan orang Belanda) yang perlu diganti karena tidak sesuai dengan semangat nasionalisme yang sedang tumbuh saat itu. Dua tahun setelah Indonesia merdeka (1945), muncullah Ejaan Suwandi atas keputusan Soewandi, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, berdasarkan surat keputusannya pada tanggal 19 Maret 1947, No. 264/Bhg.A. Ejaan Suwandi oleh masyarakat diberi julukan dengan *Ejaan Republik*.

Kedua, pendirian institusi bahasa Indonesia. Melalui kertas kerjanya, “Instituut Bahasa Indonesia”, Sanoesi Pane menyampaikan usulan adanya Instituut Bahasa Indonesia sebagai lembaga/institusi yang menangani masalah kebahasaan. Di kemudian hari, institusi yang dimaksudkan oleh Sanoesi Pane itu berdiri dengan nama Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek (ITCO) pada tahun 1947, dengan pimpinan Prof. Dr. G.J. Held. Seiring dengan

perkembangan zaman, institusi itu kemudian bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (sejak tahun 2011—sekarang).

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teks Sumpah Pemuda (1928) dan Putusan Kongres Bahasa Indonesia I (1938) sama-sama menerapkan Ejaan van Ophuijsen yang menitikberatkan penggunaan huruf *oe* (dibaca *u*), *j* (dibaca *y*), dan tanda diakritik mencakup koma, ain, dan trema. Berikutnya, di dalam teks Sumpah Pemuda (1928) terdapat kata *bangsa* dan *bahasa* yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *vaṃśa* dan *bhāṣā*. Terakhir, teks Sumpah Pemuda (1928) dan Putusan Kongres Bahasa Indonesia I (1938) melahirkan semacam politik bahasa nasional berupa pernyataan kelahiran bahasa Indonesia secara politis dan yuridis, ejaan bahasa Indonesia, dan pendirian institusi bahasa Indonesia.

5. Daftar Pustaka

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2011). *Kumpulan Putusan Kongres Bahasa Indonesia I—IX Tahun 1938—2008*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ismawati, E. (2012). *Bahasa Indonesia untuk Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Ombak.
- Jones, R. (Ed.). (2007). *Loan-Words in Indonesian and Malay*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerja sama dengan KITLV-Jakarta.
- Juanda, dkk. (2017). *Pembinaan Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kridalaksana, H. (2011). *Kamus Linguistik Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia.
- Krippendorff, K. (1980). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Beverly Hills-London: Sage Publications.
- Mulyati. (2014). *Terampil Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Munsiy, A. D. (1996). *9 dari 10 Kata Bahasa Indonesia Adalah Asing*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Paauw, S. (2009). One land, one nation, one language: An analysis of Indonesia's national language policy. In H. Lehnert-LeHouillier and A.B. Fine (Eds.), *University of Rochester Working Papers in the Language Sciences*, 5(1), 2-16.
- Rohmadi, M., dkk. (2014). *Belajar Bahasa Indonesia: Upaya Terampil Berbicara dan Menulis Karya Ilmiah*. Surakarta: Cakrawala Media.
- Sudaryanto. (2017a). "Menjunjung Bahasa Kita", *Kedaulatan Rakyat*, Edisi Kamis, 26 Oktober 2017, hlm. 1 & 7.
- Sudaryanto. (2017b). *Kamus Umum Bahasa dan Ilmu Bahasa*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Sugono, D. (Ed.). (2011). *Buku Praktis Bahasa Indonesia 2*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.